

# Litigasi

*level - Daftar pustaka*

ISSN : 0853 - 7100

PENGAKUAN ASAS LEGALITAS MATERIL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP SEBAGAI *IUS CONSTITUENDUM*

PENGADAAN TANAH BERDASARKAN PERPRES NO. 36 TAHUN 2005 JO PERPRES NO. 65 TAHUN 2006 UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NC. 5 TAHUN 1960

POLITIK HUKUM PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK SYARI'AH DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT KESEHATAN BANK

KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH

DINAMIKA HUKUM PEMBEBASAN TANAH ADAT MASYARAKAT SUKU YOKA UNTUK PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SENTANI - JAYAPURA - PAPUA

HAK SISTEM PEMILIKAN TANAH BANGSA INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HAK-HAK DERIVATIF DALAM RANGKA AGUNAN UTANG-PiUTANG

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM/ANAK NAKAL

MEMAHAMI KONSEP DEMOKRASI DAN PENERAPANNYA DALAM NEGARA HUKUM

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 DAN 48 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR DAN PENDANAAN PENDIDIKAN

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK

KRIMINALISASI KLAUSULA BAKU DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

*Aslam*

ihb. 72

## Penanggungjawab

Dr. Jaja A. Jayus, S.H., M.H.

## Dewan Redaksi

Prof.Dr.H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.

Prof.Dr.R.H. Otje Salman, S.H.

Prof Dr H. Rukmana Amanwinata, SH, MH

Prof.Dr.H. Mashudi, S.H., M.H.

Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

## Mitra Bestari

Dr. Jusuf Anwar, S.H, M.A

Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.H.

Yesmil Anwar, S.H., M.Si.

## Pemimpin Redaksi

Nurhasan, S.H., M.H.

## Redaksi Pelaksana

Dudi Warsudin, S.H., M.H.

Arman Tjoneng, SH

## Staff Redaksi

Berna S. Ermaya, S.H., M.H.

Bunyamin, Drs., M.H.

Ahmad A. Ghani, Drs., M.Ag.

Ahmad. M. Natsir

## Bendahara

Siti Rodiah, S.H., M.H.

## Sirkulasi

Wagiman, S.Fil. S.H., M.H.

## Alamat Redaksi

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung

Kampus Unpas Lt. I

Telp: 022-4262226 ; Fax. : 4217340

e-mail : [jurnallitigasi@hukum-unpas.com](mailto:jurnallitigasi@hukum-unpas.com)

ISSN: 0853 – 7100

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PENGAKUAN ASAS LEGALITAS MATERIL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP SEBAGAI <i>IUS CONSTITUENDUM</i> Ferry Fathurokhman</li> </ul>	273 - 283
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PENGADAAN TANAH BERDASARKAN PERPRES NO. 36 TAHUN 2005 JO PERPRES NO. 65 TAHUN 2006 UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 Deddy Hernawan</li> </ul>	284 - 293
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ POLITIK HUKUM PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Supri, Na'a</li> </ul>	294 - 307
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK SYARI'AH DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT KESEHATAN BANK Kurnianingsih</li> </ul>	308 - 317
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KEWENANGAN ABSOLUT PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH Ummi Maskanah</li> </ul>	318 - 329
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DINAMIKA HUKUM PEMBEBASAN TANAH ADAT MASYARAKAT SUKU YOKA UNTUK PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SENTANI - JAYAPURA - PAPUA Melkias Hetharia</li> </ul>	330 - 338
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HAK SISTEM PEMILIKAN TANAH BANGSA INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HAK-HAK DERIVATIF DALAM RANGKA AGUNAN UTANG-PIUTANG Aslan Noor</li> </ul>	339 - 353
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM / ANAK NAKAL Ahmad Irzal Fardiansyah</li> </ul>	354 - 360
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ MEMAHAMI KONSEP DEMOKRASI DAN PENERAPANNYA DALAM NEGARA HUKUM Oding Djunaedi</li> </ul>	361 - 366
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 DAN 48 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR DAN PENDANAAN PENDIDIKAN Wahyu Wiriadinata</li> </ul>	367 - 371
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK Meita Djohan Oe</li> </ul>	372 - 380
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KRIMINALISASI KLAUSULA BAKU DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN Firman Turmantara E</li> </ul>	281 - 391

**HAK SISTEM PEMILIKAN TANAH BANGSA INDONESIA  
DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HAK-HAK DERIVATIF  
DALAM RANGKA AGUNAN UTANG-PIUTANG**

Aslan Noor<sup>1</sup>

**Abstract**

*Law Number 4 Of 1996 is commendation to Section 51 Law Number 5 Of 1960, arranges about guarantee rights institute to land recognized, complements realized by it unification of law is area by management of national land. Borneo the law, brings fresh breeze for development of corporate world in Indonesia, especially for business perpetrator, land following building which above its can be made collateral good for individual people and also legal body, causing can muster fund as start-up capital in business activity to sustain development of nationality economics.*

Kata kunci : derivatif, hak, hukum, kepemilikan, tanah, tanggungan.

**A. PENDAHULUAN**

**Hubungan Antara Tanah Dengan Perorangan, Masyarakat dan Negara**

Hak milik atas tanah (*eigendom privaata*) adalah hak kodrati (*natuur recht*) dalam artian bukan hak manusia (*een menselijk recht*) yang didapat secara sukarela, tetapi sesuatu hak yang menyertai / mengikuti (*inheren*) diri manusia sejak ia lahir. Hugo Grotius (1563-1645) menyatakan bahwa kehendak manusia (*mensen will*) merupakan dasar adanya hak milik perseorangan, pada mulanya tanah dipergunakan bersama-sama oleh masyarakat, namun karena kehendak manusia, secara tegas maupun secara diam-diam terjadi perubahan, yakni pemilikan secara perseorangan. Samuel Pufendorf (1632-1694) mengemukakan bahwa secara alami (sejak semula), dijumpai pemilikan bersama atas tanah (*gemeenschappelijke eigendom*) yang berdasarkan perjanjian diam-diam ataupun secara tegas timbul pemilikan per-

orangan. Uraian tersebut menyimpulkan (sebagaimana pendapat Aristoteles (384-322 SM)) bahwa, negara tidak mungkin memiliki tanah, yang memiliki tanah adalah individual secara naturalistik dan individual secara *lichem body* (pribadi buatan, seperti Badan Hukum dan perkumpulan lainnya).

Hak-hak individual atas tanah bersifat *privaatrechtelijke*. Hak milik privat atas tanah adalah bagian dari hak milik bangsa Indonesia yang kepunyaan, peruntukan, dan penggunaannya ditujukan kepada kepentingan pribadi para individu (individu alamiah dan buatan) sebagai hak individu bangsa Indonesia yang bersifat keperdataan. Negara berkewenangan untuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), dan mengawasi (*toezicht houden*) yang tidak bertentangan dengan batas hak keperdataan. Perhubungan hukum antara negara dan tanah dapat tercermin dari perhubungan pemerintah dengan tanah, yang juga bersifat *privaatrechtelijke*. Sedangkan, perhubungan antara penggunaan kepentingan umum de-

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan  
Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung. Telp. (022) 4262226.